**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG
NOMER 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA**

Oleh: Lusya Ermauli Br Sinaga

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Efendi, SH., MHum
Pembimbing 2 : Dr. Dessy Artina, SH.,MH
Alamat : Jl. Letkol Hasan Basri, Pekanbaru - Riau
Email : Lusyaermauli@gmail.com

ABSTRACT

Freedom of expression is a fundamental part of human rights. In addition to international recognition through the Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) of 1948 or Universal Declaration of Human Rights, also nationally Indonesia is very insistent mention of freedom of expression in the Constitution of 1945. In Article 28E Paragraph (3) of the 1945 Constitution which states, "Everyone has the right to freedom of association, assembly, and expression". The right includes freedom of opinion without interruption, sertamari, receiving, and forward all information and ideas, through any media and regardless of the limit ". Freedom of expression and expression is a Universal principle in a democratic state.

Freedom of expression and association is another absolute requirement, which a State of Democracy must possess. This freedom must be guaranteed also in the law of the State concerned. The relevant State Law regulating freedom of expression and association shall expressly express freedom of expression both orally and in writing. Based on the above discussion, the authors raised the title "Analysis of Judicial Review Against Article 27 paragraph 3 of Law Number 19 Year 2016 About Information and Transactions Electronics Associated With Human Rights". The ITE Act does not limit the freedom of expression of some of the acts prohibited in Article 27 but, limiting that freedom to avoid harming others, is related to the distribution of transactions involving the violation of decency (including porno-grafy), gambling, humiliation, defamation, extortion , threats. (3) Every Person intentionally and without right to distribute and / or transmit and / or make accessible Electronic information and / or Electronic Documents with defamatory and / or defamatory content "

This type of research, the authors use the type of normative research. Normative research is literature law research, where in normative law research the literature is basic data which in research is classified as secondary data. The secondary data has a wide scope, covering personal letters, diaries, books, and official documents issued by the government.

Keywords: Yuridical Analysis - Information and Electronic Transactions - Human Right

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang fundamental. Selain memperoleh pengakuan secara Internasional melalui Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Tahun 1948 atau *Universal Declaration of Human Right*, juga secara nasional Indonesia sangat tegas mencantumkan penghargaan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Hak itu meliputi kebebasan mempertahankan pendapat dengan tanpa gangguan, serta mencari, menerima, dan meneruskan segala informasi dan gagasan, melalui media apapun dan tanpa memandang batas". Kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat adalah prinsip Universal dalam Negara demokratis. Negara atau pemerintah menciptakan kondisi yang baik dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.¹ Oleh karena itu, pemuatan kembali hak berserikat dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, adalah

¹ Muladi, *Rancangan KUHP dalam Konteks Demokrasi dan HAM, makalah pada Refreshing Course "On the Same Root and Different Development"*, Surabaya 11 April 2006, hlm. 20.

untuk menegaskannya sebagai salah satu hak asasi manusia yang menjadi salah satu hak Konstitusi, dan yang menjadi kewajiban Negara terutama Pemerintah untuk, melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhinya (Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).²

Belajar dari kasus Prita Mulyasari maka perlu dibedakan dan dibuat batasan yang tegas, kapan suatu pernyataan bersifat penghinaan atau pencemaran nama baik. Kapan hal itu berdampak pada penyampaian pendapat agar tidak terjadi pertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu ada beberapa putusan pengadilan mengenai penyalahgunaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik antara lain :

1. Kasus Arsyad tercatat sebagai tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar sejak 25 Februari 2014 lalu. Ia jadi terdakwa pencemaran nama baik Nurdin Halid, politisi Golkar, saat menjadi narasumber pada *Talkshow Obrolan Karebosi Celebes TV*. Arsyad dijerat UU ITE karena status di BB-nya yang berbunyi: "*No fear Ancaman Koruptor Nurdin Halid. Jangan Pilih Adik Koruptor*".³

² Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2008, hal. 75.

³<https://beritagar.id/artikel/berita/muhamad-arsyad-bebas-dari-ancaman-uu-ite-13575>, diakses, pada tanggal 22 April 2018.

2. Peristiwa ini menimpa Wisni Yetti di Bandung Jawa Barat. Pada Februari 2014 lalu, ia dipidanakan mantan suaminya oleh Haska Etika (bercerai pada Januari 2015). Karena Wisni *chatting* dengan teman masa remajanya, Nugraha Mursid dari Padang. Percakapan yang terjadi pada 2011 tersebut, dilaporkan dengan tuduhan mendistribusikan dan mentransmisikan kalimat atau bahasa yang dinilai bersifat asusila. Wisni pun dituntut hukuman empat bulan penjara dan denda Rp10 juta oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, 17 Februari 2015.⁴
3. Kasus Pengadilan Negeri (PN) Bantul, DIY, memvonis bebas Ervani Emi Handayani (29). Sebelumnya, ibu rumah tangga asal Bantul itu menjadi terdakwa kasus pencemaran nama baik *via* Facebook bekas atasan suaminya, Diah Sarastuty (Ayas), memperkarakan komentar Ervani di *Facebook* sehingga ia harus berhadapan dengan pasal 27 ayat UU ITE, Pasal 310 KUHP, dan Pasal 311 KUHP. Majelis Hakim menilai, pernyataan terdakwa di akun Facebook miliknya

kepada grup perusahaan tempat suaminya bekerja adalah sebuah kritikan dan bukan pencemaran nama baik. Selain memutus bebas, Ervani juga dilepaskan dari beban biaya persidangan yang akhirnya ditanggung Negara.⁵

Kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, merupakan persyaratan mutlak yang lain, yang harus dimiliki oleh suatu Negara Demokrasi. Kebebasan ini harus dijamin pula didalam Undang-Undang Negara bersangkutan. Undang-Undang Negara bersangkutan yang mengatur mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat itu harus dengan tegas menyatakan adanya kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tertulis.⁶

Berdasarkan pembahasan diatas maka saya mengangkat judul “**Analisis Tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah batasan kebebasan berpendapat dengan penghinaan?

⁵<https://beritagar.id/artikel/berita/berharap-kasus-ervani-emi-sebagai-cela-terakhir-uu-ite-18192>, diakses, pada tanggal 22 April 2018.

⁶ Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Grafiti, Bandung, 2003, hal. 177.

⁴<https://beritagar.id/artikel/berita/chatting-via-facebook-berujung-vonis-5-bulan-penjara-21638>, diakses, pada tanggal 22 April 2018.

2. Apakah batasan antara kebebasan berpendapat dengan Hak Asasi Manusia (HAM) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana aturan hukum terhadap batasan kebebasan berpendapat dengan penghinaan dan untuk mengetahui bagaimana batasan kebebasan berpendapat di kaitkan dengan hak asasi manusia (HAM).
- b.. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan agar dapat melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi terutama dalam tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui sosial media;
- c. Di harapkan dapat menjadi salah satu topik dalam diskusi lembaga lembaga mahasiswa.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Dilihat dari Perspektif HAM, dimana kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak generasi pertama yang identik dengan hak sipil dan politik seseorang selain sebagai hak pribadi yang menuntut hak pemenuhan serta perlindungannya yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi oleh siapapun dan oleh apapun, bahkan Negara

sekalipun.⁷ Menurut Todung Mulya Lubis ada empat teori HAM yang sering dibahas dalam berbagai kesempatan yang berkaitan dengan disiplin keilmuan yang didalamnya ada unsur-unsur mengenai HAM, yaitu:

1. Teori Hak-Hak Alami (*Natural Rights Theory*)

Teori kodrati mengenai hak (*natural rights theory*) yang menjadi asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia bermula dari teori hukum kodrati (*natural rights theory*). Teori ini dapat diurut kembali jauh ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke Zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas.⁸

2. Teori Positivisme (*Positivist Theory*)

Teori ini berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum yang riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi (*rights, then should be created and granted by constitution, laws, and contracts*). Teori atau mazhab positivisme ini memperkuat serangan dan penolakan kalangan utilitarian, dikembangkan

⁷ Kuntzoro Probopranoto, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hal. 86.

⁸ Rhona K. M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 32.

belakangan dengan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari “alam” ataupun “moral”.⁹

3. Teori Relativisme Budaya (*Cultural Relativist Theory*)

Teori ini merupakan salah satu bentuk anti-tesis dari teori hak-hak alami (*natural rights*). Teori ini berpandangan bahwa hak itu bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi cultural terhadap dimensi kultural yang lain, atau disebut dengan imperialisme kultural (*cultural imperialism*). Yang ditekankan dalam teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan (*different ways of being human*). Oleh karenanya, penganut teori ini mengatakan, *that rights belonging to all human beings at all times in all places would be the rights of desocialized and deculturized beings*.¹⁰

2. Teori Kriminalisasi

Kebijakan kriminalisasi merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.¹¹

Kriminalitas atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. Walaupun begitu kategori terakhir, teroris, agak berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif politik atau paham.

Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum: seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh

⁹ *Ibid*, hlm. 34.

¹⁰ Mujaid Kumelo, dkk, *Op. cit*, hlm. 34.

¹¹ Barda Nawawie Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 2-3.

pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana. Dalam mendefinisikan kejahatan, ada beberapa pandangan mengenai perbuatan apakah yang dapat dikatakan sebagai kejahatan :

- a. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi non-formal;
- b. Secara yuridis, kejahatan berarti segala suatu tindakan atau tingkah laku manusia yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui dapat dipidana secara legal, dan diatur dalam hukumpidana;
- c. Dari segi kriminologi, setiap tindakan Dari segi kriminologi setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tindakan disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan

serta menjengkelkan masyarakat, secara kriminologi dapat dikatakan sebagai kejahatan;

- d. Arti kejahatan dilihat dengan kaca mata hukum, mungkin adalah yang paling mudah dirumuskan secara tegas dan konvensional. Menurut hukum kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum; tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan bertempat tinggal.¹²

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum adalah himpunan-himpunan peraturan yaitu berisi perintah dan larangan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karna itu harus ditaati oleh masyarakat.¹³
2. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang yang didakwakan kepada

¹² Soedjono, D,S.H.,*Ilmu Jiwa Kejahatan, Amalan, Ilmu Jiwa Dalam Studi Kejahatan, Karya Nusantara,Bandung, 1977, hlm.15.*

¹³ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007,hlm.43.

pendakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan boleh di pergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan yang di dakwakan.¹⁴

3. Keterangan saksi adalah alat bukti yang kuat untuk mempidanakan terdakwa.¹⁵

4. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara-cara yang di atur dalam Undang-Undang.¹⁶

5. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang atau suatu aturan hukum, larangan serta ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁷

6. Hak Asasi Manusia (HAM) jadi tidak boleh kebebasan berbicara tersebut dilarang dan juga tidak boleh ada suatu undang-undang atau aturan yang mengkriminalkan hal tersebut.

7. Terdakwa adalah “*seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan*”.

¹⁴ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 257.

¹⁵ Pasal 1 Butir 27 *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

¹⁶ Pasal 1 Butir 28 *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

¹⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Cet IV, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.39.

Untuk bisa ditetapkan sebagai terdakwa, menurut Komariah harus ada cukup bukti sebagai dasar alasan pemeriksaan di pengadilan. Artinya, orang yang sudah menyanggah predikat sebagai terdakwa telah diduga kuat melakukan tindak pidana.¹⁸

8. Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic*, data *interchange* (EDI), Surat Elektronik, (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda angka, atau kode akses, symbol atau Perforasi yang telah di olah yang memiliki arti atau dapat di pahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁹

9. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan perkataan lain baik secara preventif maupun represif.²⁰

10. Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang padadasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan

¹⁸ Pengertian Menurut Pasal 1 angka 15 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

¹⁹ Pasal 1 Butir 1 *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

²⁰ Dikutip dari *Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, di mana dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 3 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok hukum pembahasan.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus bahas Indonesia dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode kajian kepustakaan dan studi dokumen dengan mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Data-data yang terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklarifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif. Dianalisis secara “*deskriptif kualitatif*” (karena data-data yang digunakan tidak berupa statistik) yaitu suatu metode analisis hasil studi

²¹ Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, *Dictum 3*, Jakarta, 2004, hlm.17.

kepuustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode *deduktif* yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis.²² Dengan menggunakan metode analisis tersebut diharapkan pada akhirnya akan dapat mengantarkan kepada suatu kesimpulan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Analisis dan Yuridis

Berhubungan dengan ini harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan Para Hakim.²³ Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan Hal-hal yang dimaksud.

B. Tinjauan Umum Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP menunjukkan adanya konflik norma diantara kedua undang-undang tersebut. Baik menyangkut rumusan normanya, maupun ancaman pidananya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *normative* yakni mengkaji dari bahan-bahan hukum primier dan bahan hukum sekunder. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggung jawaban pidana pencemaran nama baik menurut pasal 310 kuhp dan pasal 27 Ayat3 undang-undang No 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik kedua bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Pencemaran nama baik berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku. Tindak pidana yang memenuhi rumusan KUHP dan Undang-Undang ITE tersebut diatas merupakan tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana, karena perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang tersebut merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab serta adanya unsur kesengajaan atau kealpaan yang berarti bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan tercela yang dilarang oleh undang-undang.²⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

Hak asasi fundamental Untuk memahami hakikat Hak

²² Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 23.

²³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-2, hlm.1.

²⁴ Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 45.

Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.²⁵

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Batasan Kebebasan Berpendapat Dengan Penghinaan

Perkembangan teknologi yang kian pesat menjadikan perbedaan jarak dan waktu tak berarti. Segala kebutuhan manusia kini lebih mudah untuk dipenuhi, terutama kebutuhan manusia akan informasi. Derasnya hujan informasi dapat menjamah hampir seluruh Negeri. Mulai dari berita terbaru sampai berita lawas yang sudah ketinggalan zaman pun dapat dengan mudah diakses. Perkembangan teknologi ini menjadikan daya kreasi dan inovasi manusia seakan telah menemukan wadahnya. Kebebasan berekspresi pun dapat dituangkan melalui beragam media baik media elektronik maupun media cetak. Pidana.

Penyampaian dan penyebaran informasi melalui media cetak maupun elektronik sering kali tidak mengikuti kaedah-kaedah yang berlaku di

masyarakat. Dalam hal ini banyak yang beranggapan bahwa informasi yang disampaikan melalui media tersebut itu bersifat personal dan rahasia sehingga penelusuran mengenai identitas penyebar informasi tersebut tidak dapat diketahui secara jelas dan pasti. Dalam penyampaian Informasi, subjek hukum yang paling berperan adalah pers. Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.²⁶

Pers merupakan institusi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media kontrol sosial, pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi.²⁷ Pergeseran antara pers dengan masyarakat dapat terjadi sebagai akibat sajian yang dianggap merugikan oleh seseorang atau golongan tertentu. Hal ini menuntut satu penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh pihak terkait.

²⁵ Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta Prenada Media, 2003, hal. 199.

²⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

²⁷ *Ibid*, hal. 3.

Fenomena mengenai pergeseran dimaksud mengemuka dalam bentuk tuntutan hukum masyarakat terhadap pers, tindakan main hakim sendiri terhadap wartawan dan sebagainya. Kesemuanya itu menunjukkan betapa penting untuk menciptakan penyelesaian yang adil ketika terjadi persengketaan antara pers dengan masyarakat. Ancaman hukum yang paling sering dihadapi media atau wartawan adalah menyangkut pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. KUHP sejatinya tidak mendefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan penghinaan, akibatnya perkara hukum yang terjadi seringkali merupakan penafsiran yang subyektif. Seseorang dengan mudah bisa menuduh pers telah menghina atau mencemarkan nama baiknya, jika ia tidak suka dengan cara pers memberitakan dirinya. Hal ini menyebabkan pasal-pasal penghinaan (dan , 5 penghasutan) sering disebut sebagai “ranjau” bagi pers, karena mudah sekali dikenakan untuk menuntut pers atau wartawan.²⁸ Politik Hukum Kebebasan Berpendapat untuk Masa Depan Politik Hukum HAM terkait kebebasan berpendapat saat ini sudah mengalami kemajuan dibandingkan masa Orde Baru dahulu, namun tidak dapat dipungkiri ada kelemahan yang ditemukan seiring perkembangannya, salah satunya adalah kelemahan yang

28

<http://www.romeltea.com/2010/01/01/melawan-pers-dengan-delikpencemaran-namabaik/>, diakses pada 03 Mei 2018, pukul 13.20 WIB

ditimbulkan oleh Undang-Undang ITE.

Di samping itu, pers juga seringkali memberitakan informasi-informasi yang tidak aktual. Pemberitaan informasi tersebut tidak mendasar, tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi dan cenderung berisi penghinaan, sehingga sangat merugikan pihak yang menjadi objek pemberitaan. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi melalui media massa maupun elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum tersebut. Pers dalam melakukan kegiatan jurnalistik membutuhkan adanya kebebasan dan tanggung jawab. Tanpa kebebasan, pers akan mengalami kesulitan untuk mengekspresikan atau menyampaikan suatu informasi kepada peminatnya. Akan tetapi, kebebasan yang tidak dibarengi dengan tanggung jawab akan menjerumuskan pers tersebut ke dalam praktik jurnalistik yang kotor dan merendahkan harkat dan martabat manusia.²⁹

B. Batasan Antara Kebebasan Berpendapat Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)

Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang

²⁹ Muslimin M, 2005, *Pentingnya Aspek Hukum dalam Menjalankan Profesi Jurnalistik Legality Jurnal Ilmiah Hukum*, vol.13, no.1, Maret-Agustus 2005, Jakarta, hlm. 186

fundamental. Selain memperoleh pengakuan secara Internasional melalui Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Tahun 1948 atau *Universal Declaration of Human Right*, juga secara nasional Indonesia sangat tegas mencantumkan penghargaan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Hak itu meliputi kebebasan mempertahankan pendapat dengan tanpa gangguan, serta mencari, menerima, dan meneruskan segala Informasi dan gagasan, melalui media apapun dan tanpa memandang batas”. Kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat adalah prinsip Universal dalam Negara demokratis. Negara atau pemerintah menciptakan kondisi yang baik dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.³⁰ Oleh Karena itu, pemuatan kembali hak berserikat dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, adalah untuk menegaskan sebagai salah satu hak asasi manusia yang menjadi salah satu hak Konstitusi, dan yang menjadi kewajiban Negara terutama Pemerintah untuk, melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhinya (

³⁰ Muladi, *Rancangan KUHP dalam Konteks Demokrasi dan HAM, makalah pada Refreshing Course “On the Same Root and Different Development”*, Surabaya 11 April 2006, hlm. 20.

Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).³¹

Kesesuaian antara hukum nasional tentang kebebasan berpendapat yaitu Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sudah sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kovenan-kovenan internasional, karena pada dasarnya memang undang-undang ini mengadopsi apa yang tercantum di dalam DUHAM dan ICCPR lalu disesuaikan dengan budaya lokal sehingga mampu berkembang dan berbaur di masyarakat. Undang-undang kebebasan berpendapat di Indonesia memang sudah sesuai dengan apa yang berlaku di dalam masyarakat internasional hanya saja implementasi di dalam setiap detail masyarakatnya saja yang kurang, namun ada satu celah tentang kebebasan berpendapat yang belum sesuai dengan pendapat hukum internasional yaitu pengakuan bahwa internet adalah bagian dari HAM kebebasan berpendapat manusia. Hanya pemahaman tentang internet adalah bagian dari HAM yang masih belum memiliki sinergi dengan apa yang diakui di PBB.³²

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

³¹ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2008, hal. 75.

³² *Ibid* hal 123

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Batasan kebebasan berpendapat dengan Penghinaan maka berdasarkan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hadir untuk memberikan pembatasan. Bahwa “dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. “ Maksud dari Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 penting untuk dimaknai, bahwa negara kita tidak hanya mengakui prinsip demokrasi semata, tetapi juga diikuti dengan pengakuan prinsip Negara hukum.
2. Batasan Antara Kebebasan Berpendapat Dengan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Hak

itu meliputi kebebasan mempertahankan pendapat dengan tanpa gangguan, serta mencari, menerima, dan meneruskan segala Informasi dan gagasan, melalui media apapun dan tanpa memandang batas”. Kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat adalah prinsip Universal dalam Negara demokratis. Negara atau pemerintah menciptakan kondisi yang baik dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Oleh Karena itu, pemuatan kembali hak berserikat dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, adalah untuk menegaskannya sebagai salah satu hak asasi manusia yang menjadi salah satu hak Konstitusi, dan yang menjadi kewajiban Negara terutama Pemerintah untuk, melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhinya (Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka yang dapat menjadi saran dalam Skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk Aparat Pemerintah seharusnya Pemanfaatan yang didapatkan dari penggunaan ITE dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bukannya memanfaatkannya dalam

pelanggaran hukum dan merugikan orang banyak. Walaupun kegiatan tersebut sudah mendapat perhatian yang lebih dari pihak pemerintah dan penegak hukum, hendaknya sebagai pengguna teknologi informatika kita harus lebih menyadari ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Maka dalam menggunakan teknologi Informatika, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesalahan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya Undang-Undang ITE maka akan mengamankan setiap kegiatan yang dilakukan secara online dan melindungi hak dari tandatangan Elektronik yang dimiliki oleh seluruh pengguna.

2. Untuk Aparat Penegak Hukum agar lebih tegas dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang dan juga Sebagai warga Negara yang baik, marilah bersama-sama memanfaatkan kecerdasan dalam dunia teknologi informatika dengan sebaik-baiknya. Karena kesadaran individu sendirilah yang sangat berperan penting dalam penegakan setiap peraturan yang dibuat. Jika peraturan tersebut ditaati, maka akan sangat mudah mengatur segala

urusan dalam hubungan Internasional. Karena dengan teknologi informasi era ini, memudahkan setiap orang untuk mendapatkan informasi secara cepat dimanapun berada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arianto Satya, 2008, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta.
- Arief Barda Nawawie, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Cet IV*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap Krisna, 2003, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Grafiti, Bandung.
- Muladi, 2006, *Rancangan KUHAP dalam Konteks Demokrasi dan HAM, makalah pada Refreshing Course "On the Same Root and Different Development"*, Surabaya.
- Mudzakir, 2004, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Dictum 3*, Jakarta.

- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muslimin M, 2005, *Pentingnya Aspek Hukum dalam Menjalankan Profesi Jurnalistik Legality Jurnal Ilmiah Hukum*, vol.13, Jakarta.
- Probopranoto Kuntzoro, 2009, *Hak Azasi Manusia dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rhona K. M. Smith, dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tim ICCE UIN Jakarta, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta
- <https://beritagar.id/artikel/berita/ch-ating-via-facebook-berujung-vonis-5-bulan-penjara-21638>, diakses, pada tanggal 22 April 2018.
- <https://beritagar.id/artikel/berita/b-erharap-kasus-ervani-emi-sebagai-cela-terakhir-uu-ite-18192>, diakses, pada tanggal 22 April 2018.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

C. Website

- <https://beritagar.id/artikel/berita/m-uhammad-arsyad-bebas-dari-ancaman-uu-ite-13575>, diakses, pada tanggal 22 April 2018